

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TERORISME DI PERBATASAN LAUT INDONESIA-FILIPINA

STATE DEFENSE STRATEGY IN FACING THREATS OF TERRORISM IN THE SEA BORDER OF INDONESIA-PHILIPPINES

Stella Paschalina¹, Tri Legionosuko², Suhirwan Suhirwan³

UNIVERSITAS PERTAHANAN
(elquicksmart@gmail.com)

Abstrak – Wilayah perbatasan Indonesia-Filipina memiliki kerawanan dan ancaman terorisme yang berasal dari wilayah Filipina Selatan. Ancaman yang datang tidak hanya berasal dari perbatasan laut melainkan dari para pelintas batas yang kerap beraktivitas dan memasuki wilayah Indonesia melalui Pulau Miangas dan Pulau Marore. Selain itu, ancaman Foreign Terrorist Fighter yang pulang dari Suriah dan Irak dan juga keberadaan undocumented citizen di wilayah Sulawesi Utara semakin mengkhawatirkan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa Indonesia. Permasalahan penelitian yang diteliti adalah pola ancaman terorisme yang berada di wilayah perbatasan laut Indonesia – Filipina dan strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman terorisme di perbatasan laut Indonesia – Filipina. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ancaman terorisme yang berada di wilayah perbatasan Indonesia – Filipina dan menyusun strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman terorisme di perbatasan laut Indonesia – Filipina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh berasal dari wawancara dan studi dokumentasi. Peneliti mewawancarai para informan yang telah ditunjuk dan mengumpulkan data sekunder kemudian dianalisa menggunakan teknik analisa data Milles-Huberman-Saldana tahun 2014. Hasil dari penelitian ini adalah ancaman terorisme yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina khususnya Sulawesi Utara adalah berasal dari para pelintas batas, penyelundupan senjata yang akan didistribusikan kepada para jaringan teroris, Foreign Terrorist Fighter yang pulang dari Suriah dan Irak, adanya ikatan kekeluargaan antara suku di wilayah Sulawesi Utara dengan masyarakat di wilayah Filipina Selatan. Kemudian keberadaan undocumented citizen yang berjumlah ribuan semakin membuat wilayah perbatasan laut Indonesia-Filipina semakin terancam. Strategi pertahanan negara adalah dengan membuat legal standing yang jelas tentang kantor wilayah pertahanan, pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara, mempererat hubungan dengan tokoh masyarakat, pembentukan tim perbatasan yang solid, dan membuat program studi di Universitas Pertahanan yang fokus pada isu-isu perbatasan.

Kata Kunci: Ancaman, Perbatasan, Pertahanan Negara, Strategi, Terorisme

Abstract – The Indonesia-Philippines border region is vulnerable to the threat of terrorism originating in the southern Philippines. The threat that comes not only comes from the sea border but the foreign residents who often move and enter Indonesian territory through Miangas Island and Marore Island. In addition, the threat of Foreign Terrorist Fighter returning from Syria and Iraq and also the existence of undocumented citizens in the North Sulawesi region increasingly worries about the country's sovereignty and the safety of the Indonesian people. The research problems examined are the threat of terrorism in the Indonesia - Philippines border region and the national defense

¹ Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

² Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

³ Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

strategy in facing the threat of terrorism on the Indonesia - Philippines border. The aims of this study are to determine the threat of terrorism in the border regions of Indonesia - Philippines and formulate a national defense strategy in the face of the threat of terrorism on the Indonesia - Philippines border. This research uses a qualitative method where the data obtained comes from interviews and documentation studies. The researcher interviewed the informants who had been appointed and collected secondary data then analyzed them using Milles-Huberman-Saldana data analysis techniques in 2014. The results of this study are the threat of terrorism in the Indonesia-Philippines border region, especially North Sulawesi, originating from border crossers, arms smuggling to be distributed to terrorist networks, Foreign Terrorist Fighter returning from Syria and Iraq, the existence of familial ties between tribes in the North Sulawesi region with communities in the Southern Philippines region. Then the existence of undocumented citizens numbering in the thousands increasingly makes the Indonesia-Philippines border region increasingly threatened. The national defense strategy is to make a clear legal standing about the regional defense office, to educate nationalism, to make national defense education, to create strengthen relationships with community leaders, form a solid border team, and to create a study program at the Defense University that focuses on border issues.

Keywords: Border Security, National Defense, Strategy, Terrorism, Threat

Pendahuluan

Wilayah Indonesia berbatasan dengan beberapa negara seperti Australia, Filipina, India, Malaysia, Singapore, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam⁴. Perbatasan Indonesia-Filipina terdiri dari perbatasan laut di Laut Sulawesi yang telah disepakati dalam sebuah kesepakatan bilateral antara Indonesia dan Filipina pada tahun 2014⁵. Pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perbatasan negara kepulauan disesuaikan rezim hukumnya yang dibedakan dalam

pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan pedalamaan, perairan nusantara (kepulauan), laut wilayah zona tambahan, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif dan laut lepas⁶.

Dalam dokumen perjanjian tersebut telah disepakati batas Indonesia dan Filipina termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang ditentukan melalui delapan titik koordinat geografis⁷. Undang-Undang Nomor 34

⁴ Indien Winawarti, "Penguatan Hak Berdaulat (Sovereign Right) pada ZEE Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut", Jurnal Legality, Vol. 24, No. 2, 2017, hlm. 172-180.

⁵ T.J.A. Burgiono, "PH, Indonesia sign model maritime pact" dalam <https://globalnation.inquirer.net/105035/ph-indonesia-sign-model-maritime-pact>., diakses pada 05 Agustus 2019.

⁶ Suwardi, "Penegakan Hukum di Laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", Jurnal Hukum Pembangunan, Vol 15, Nomor 1. Tahun 2017, hlm. 1-16, 2017, hlm. 1-16

⁷ Departement of Foreign Affairs of Philippine Government, "Agreement between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Republic Indonesia concerning the delimitation of the Exclusive Economic Zone boundary" dalam <http://www.officialgazette.gov.ph/2014/05/23/agreement-between-the-government-of-the-republic-of-the-philippines-and-the>

Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memberikan penjelasan bahwa TNI AL yang berperan sebagai eksekutor dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk menjaga dan mengamankan Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Namun, pada tahun 2014 Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 178 tentang Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia khususnya kapal asing. Dengan lahirnya peraturan tersebut melahirkan keambiguan tentang pihak yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar kedaulatan wilayah Indonesia.

Misalnya, ada beberapa kasus yang telah terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina seperti kasus penyanderaan dan pembajakan kapal yang dilakukan kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Sejak tahun 2016, sebanyak 36 orang Warga Negara Indonesia (WNI) pernah disandera oleh kelompok

government-of-the-republic-indonesia-concerning-the-delimitation-of-the-exclusive-economic-zone-boundary/diakses 05 Agustus 2019.

bersenjata tersebut dan seluruhnya sudah berhasil dibebaskan meskipun salah satunya meninggal dunia⁸. Kasus penyanderaan dan pembajakan kapal ini terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mana dalam wilayah tersebut masih menjadi kewenangan TNI berdasarkan Undang-Undang.

Namun, pada pelaksanaan lapangannya masih terjadi tumpang tindih koordinasi tentang siapa yang berwenang menanganinya. Banyak yang menganggap hal ini adalah tindakan kriminal sehingga menganggap hal ini menjadi kewenangan kepolisian. Padahal berdasarkan wilayah hukumnya, area ZEE adalah wilayah yuridiksi TNI untuk melakukan penindakan atas pelanggaran kedaulatan. Meskipun melalui Peraturan Presiden telah dibentuk BAKAMLA namun secara hierarki Undang-Undang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan legal untuk dijalankan. Pada tahun 2016, Indonesia-Malaysia-Filipina telah duduk bersama untuk membuat kerjasama trilateral untuk melakukan pengamanan wilayah perbatasan perairan ketiga negara yang dikenal

⁸ CNN Indonesia, "Kemenlu Sebut Tak Ada Nelayan Indonesia Diculik Abu Sayyaf" dalam https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190619164319-106-4046_86/kemenlu-sebut-tak-ada-nelayan-indonesia-diculik-abu-sayyaf, diakses 17 Juli 2019

dengan INDOMALPHI.⁹ Namun hingga 2017, kerjasama ini juga belum terlaksana karena banyaknya permasalahan yang melatarbelakangi mulai dari sengketa perbatasan, penentuan tempat untuk peresmian *Maritime Command Center*, pecahnya pertempuran di Marawi, serta perbedaan sistem hukum ketiga negara dalam menanggulangi terorisme¹⁰.

Hal ini pada akhirnya memberikan konsekuensi logis kepada Indonesia sebagai penyedia jalur pelayaran yang dilalui oleh kapal-kapal asing yang berasal dari berbagai negara¹¹. Sehingga secara tidak langsung menjadikan wilayah lautan Indonesia sebagai “teras depan” suatu negara, wilayah perbatasan Indonesia menyimpan beberapa masalah kompleks baik dari aspek keamanan seperti smuggling

berupa *human trafficking*¹², *arms and ammunition*, serta *asylum seeker*. Selain *smuggling*, adapun beberapa masalah lain lagi seperti ancaman *illegal fishing*, *narcotics trading*, dan terorisme yang mana masalah-masalah ini merupakan ancaman asimetris yang mengancam wilayah perbatasan khususnya yang berada di perbatasan Indonesia dan Filipina. Kerawanan juga datang dari pada pelintas batas yang keluar masuk daerah perbatasan Pulau Miangas dan Pulau Marore dengan alasan *family visit* namun tingkat pengamanan masih sangat rendah. Selain itu banyak wilayah pesisir pantai di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina yang merupakan pantai kosong atau tidak ada penjagaan resmi dari petugas sehingga semakin menambah tingkat kerawanan penyelundupan. Ancaman- ancaman asimetris ini merupakan ancaman yang mengancam kedaulatan dan keselamatan bangsa Indonesia.

Kemudian pada tahun 2016 terdapat kasus hilangnya 4 (empat) prajurit TNI AL di perbatasan Indonesia-

⁹ Senat Filipina, “Treaties/Agreement Submitted For Concurrence By The Senate”, dalam https://www.senate.gov.ph/17th_congress/treaties_17thcongress.asp,. diakses 10 September 2019

¹⁰ Ade Nurul Rezky, “Kerjasama Trilateral Indonesia Malaysia Filipina Dalam Menanggulangi Kelompok Teroris Abu Sayyaf”, *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 6, No. 3, 2018, hlm. 1-19

¹¹ Budi H. Bangun, “Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum Tanjungpura*, Vol. 1. Issue 1, 2018, hlm.52-63

¹² Yudha Manggala Putra, “Penjaga Pantai Filipina Amankan 86 Korban Perdagangan Manusia”. dalam <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/01/13/mgkm1q-penjaga-pantai-filipina-amankan-86-korban-perdagang-an-manusia>,. diakses 05 Agustus 2019

Filipina pun masih misterius hingga saat ini. Dimana keempat prajurit TNI AL tersebut hilang di perairan Talaud, Sulawesi Utara saat melakukan pengamanan terhadap kapal asing berbendera Filipina¹³. Hingga saat ini, tidak diketahui siapa yang menjadi dalang atas hilangnya keempat prajurit TNI AL tersebut. Sehingga hal ini memberikan potret bahwa wilayah perbatasan laut Indonesia-Filipina memiliki kerawanan asimetris yang melahirkan teror sebab telah memakan korban dari pihak militer. Kasus penyelundupan senjata juga kerap terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina seperti di wilayah Sulawesi Utara. Pada tahun 2018, ada seorang tersangka tindak pidana terorisme, Fadhli Sadama yang ternyata belanja senjata api yang berasal dari Filipina melalui jalur Sulawesi¹⁴. Kemudian pada tahun 2014, Polda Papua berhasil mengungkap perdagangan senjata dari Mindanao,

¹³ Ikanubun, "Misteri Hilangnya 4 Prajurit TNI AL di Perbatasan RI-Filipina" dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/3020485/misteri-hilangnya-4-prajurit-tni-al-di-perbatasan-ri-filipina>., diakses 05 Agustus 2019.

¹⁴ Adi Suhendi, "Sulawesi Utara Daerah Rawan Masuknya Senjata Api Ilegal" dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2012/01/16/sulawesi-utara-daerah-rawan-masuknya-senjata-api-ilegal>., diakses 05 Agustus 2019.

Filipina Selatan melalui Pulau Sangihe Talaud, Sulawesi Utara ketika seorang pria berinisial JM tertangkap membawa ratusan amunisi bersama 3 pucuk senjata, jenis Armalite AR-15, Revolver dan FN di Pelabuhan Sorong¹⁵.

Lalu Kodam XIII Merdeka berhasil menemukan jalur peredaran senjata api ilegal di wilayah Sulawesi Utara dan juga permasalahan kelompok masyarakat Sapi-Pisang (*Sangir-Philippines dan Philippines-Sangir*) atau mereka yang bukan penduduk Indonesia maupun Filipina tapi sering melewati jalur Indonesia-Filipina, sebagian karena nelayan dan berdagang tradisional yang sudah dijalani turun temurun. Serta menurut penjelasan Asintel Kodam XIII Merdeka kala itu, keamanan perbatasan menjadi semakin rawan terhadap masuknya barang jenis apapun yang ilegal dan orang-orang yang masuk secara ilegal dan tanpa identitas sah. Bahkan pernah dilakukan penahanan terhadap orang yang masuk secara ilegal dan memiliki identitas anggota *Moro Islamic* dan beberapa kelompok separatis

¹⁵ Alfian Sartono, Polda Papua Dalam Penyelundupan Senjata dari Filipina Selatan" dalam <https://regional.kompas.com/read/2014/05/23/0843297/Polda.Papua.Dalam.Penyelundupan.Senjata.dari.Filipina.Selatan>, diakses 05 Agustus 2019.

bersenjata yang berada di Filipina¹⁶. Sehingga hal ini memberikan dampak pada keamanan wilayah regional Sulawesi Utara maupun wilayah nasional Indonesia ditambah lagi dengan keberadaan 1200 orang undocumented citizen di wilayah Sulawesi Utara¹⁷.

Keberhasilan serangan militer Filipina memukul mundur pasukan ISIS di Basis ISIS di Marawi diyakini akan sangat mempengaruhi kondisi keamanan nasional Indonesia. Apalagi kota Marawi merupakan basis ISIS di Asia Tenggara. Dengan terdesaknya ISIS di wilayah timur tengah, membuat ISIS mengubah strategi dengan menciptakan kantong-kantong baru di Asia Tenggara tepatnya di Marawi (Filipina) yang berbatasan langsung dengan wilayah provinsi Sulawesi Utara (Indonesia). Bahkan analisa dari intel Kodam XIII Merdeka Sulawesi Utara bahwa jika terdesak militan ISIS mungkin melarikan diri ke

wilayah Indonesia melalui jalur-jalur pulau terluar yang masih menjadi wilayah Tarakan (Kalimantan), Sulawesi Utara (Sulawesi) dan jalur Ambon (Maluku). Ketiga jalur tersebut akan menjadi jalur favorit bagi para militan ISIS untuk memasuki wilayah Indonesia¹⁸.

Mengacu pada permasalahan diatas, peneliti mengambil *locus* penelitian di sekitar wilayah Sulawesi Utara yang berada di Perbatasan Indonesia-Filipina. Sebab menurut hemat peneliti, wilayah tersebut masih memerlukan strategi pertahanan negara yang harus diperkuat untuk menjamin tegaknya kedaulatan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia. Dimana Kementerian Pertahanan selaku penyelenggara urusan di bidang pertahanan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan strategi pertahanan negara sesuai dengan perencanaan agar tercapainya tujuan negara. Berdasarkan berbagai permasalahan yang disampaikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pola ancaman terorisme di perbatasan laut Indonesia-Filipina khususnya di

¹⁶ SM, "Wah !!! Jalur Peredaran Senjata Api Ilegal Ditemukan Kodam XIII/Merdeka di Sulut, Ini Buktinya", dalam <https://berita-manado.com/wah-jalur-peredaran-senja-tapi-ilegal-ditemukan-kodam-xiii-merde-ka-di-sulut-ini-buktinya/>,. diakses 05 Agustus 2019.

¹⁷ Aldi, "10 Fakta Penangkapan Terduga Teroris di Bitung: Kronologi, Rencana Teror hingga Transit ke Poso". Retrieved from <https://manado.tribunnews.com/2019/05/08/10-fakta-penangkapan-terduga-teroris-di-bitung-kronologi-rencana-teror-hingga-transit-ke-poso>.,diakses 21 September 2019.

¹⁸ Yeremia Sukoyo, "3 Wilayah Perbatasan Indonesia Rawan disusupi ISIS." dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/462672/3-wilayah-perbatasan-indonesia-rawan-disusupi-isis>., diakses 18 Juli 2019

wilayah Sulawesi Utara dan bagaimana strategi pertahanan negara Indonesia untuk menghadapi hal tersebut.

Metodologi Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori dan konsep antara lain Teori Strategi, Teori Terorisme, Teori Hambatan, Teori Sinergi, Teori Hukum Lawrence Friedman, Konsep Ancaman Pertahanan Negara, Konsep Kejahatan Transnasional, dan Konsep Penggalangan.

Dimana teori strategi berupa ends, means dan ways sebagai payung dalam melaksanakan penelitian nantinya guna melihat strategi pertahanan negara yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan dalam menghadapi ancaman terorisme di perbatasan Indonesia – Filipina yakni wilayah Sulawesi Utara, teori ini akan mendapat dukungan dari teori hambatan dan teori sinergi.

Kemudian teori terorisme sebagai alat untuk menganalisa ancaman terorisme merupakan salah satu tindakan yang mengancam kedaulatan negara khususnya di wilayah Sulawesi Utara yang berada di perbatasan Indonesia-Filipina dimana secara khusus Strategi Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme... | **Paschalina, Legionosuko, Suhirwan** | 189

menggunakan pola ‘pohon terorisme’ yang dibuat oleh A.M. Hendropriyono. Teori ini mendapat dukungan dari konsep ancaman pertahanan negara dan konsep kejahatan transnasional.

Kemudian peneliti menggunakan teori hukum Lawrence Friedman dan konsep penggalangan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan ancaman terorisme di perbatasan laut Indonesia-Filipina.

Agar penelitian ini memperoleh data, maka peneliti menentukan tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah Kementerian Pertahanan dan pengambilan data di wilayah Lantamal VIII Manado, Kodam XIII Merdeka, Lanud Sam Ratulangi Manado, dan Badan Keamanan Laut Zona Maritim Tengah Manado.

Adapun pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan sebagai partisipan/non partisipan, yaitu peneliti hanya menyaksikan dan membuat catatan lapangan dari kejauhan dengan merekam data tanpa terlibat langsung dengan aktivitas informan dilapangan. Dalam kata lain, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi.

Adapun proses analisa data yang digunakan pada penelitian ini

menggunakan metode analisis data yang ditemukan oleh Miles and Huberman yaitu data condensation, data display, dan conclusion drawing / verification yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh¹⁹.

Hasil dan Pembahasan

Ancaman Terorisme di Perbatasan Laut Indonesia-Filipina

Ada empat hal yang menjadi sumber dari gerakan terorisme di Indonesia²⁰. Sumber ini merupakan warisan dari gerakan Jamaah Islamiyah. Pertama, ideologi Salafiyah yang telah berakar sebelumnya pada gerakan Darul Islam yang erat kaitannya dengan organisasi Persatuan Islam (PERSIS). Kedua, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang didirikan oleh Mohammad Natsir semakin berorientasikan Salafiyah setelah mendapatkan dana bantuan pendidikan, dakwah, dan pembangunan mesjid dari

Islamic World League atau Rabitah al-'Alam al-Islami. Ketiga, pemikiran tokoh-tokoh Ikhwan al-Muslimin (IM) atau juga disebut sebagai Jamaah Islamiyah di Mesir yang mempengaruhi Sungkar dan Ba'asyir serta memberikan inspirasi bagi mereka untuk mendirikan gerakan usrah di Indonesia. Keempat, Ideologi Mujahidin Afghanistan dan Al-Qaeda. Abdullah Azzam, salah seorang pemimpin Rabitah al-'Alam al-Islami yang juga merupakan pemimpin Maktab al-Khidmat yang merekrut, mendanai, dan melatih pejuang-pejuang Afghanistan untuk melawan Uni Soviet. Sungkar dan Azzam pernah ikut berlatih di kamp pejuang yang dipimpin oleh Abdul Rasul Sayyaf yang berpahamkan Wahabi. Tulisan-tulisan Azzam yang berkaitan dengan jihad dipercayai memiliki jaringan dengan JI atau Pondok Ngruki di Solo.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme²¹, ada sekitar 1000 lebih anak simpatisan Negara Islam di Suriah dan Irak (ISIS) di deportasi saat ingin memasuki Suriah. Mereka sangat rentan untuk menjadi kelompok radikal atau bahkan pelaku

¹⁹ Matthew B. Milles, Huberman, J. Saldana, "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.", (California: SAGE Publication Inc, 2014), hlm. 31

²⁰ Rogin, J. (2016). "Islamic State Is Rapidly Expanding in Southeast Asia," Bloomberg View." dalam <http://originwww.bloombergvew.com/articles/2015-0529/Islamic-state-makes-a-move-on-south-east-asia>, diakses 20 September 2019.

²¹ Aldi, "Abu Bakar Ba'asyir akan 'pilih bertahan di penjara, dan tolak bebas bersyarat" dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46942952>, diakses 18 September 2019.

terorisme saat kembali ke Indonesia. Maka dari itu, perlu dilakukan identifikasi, eksplanasi, pemetaan, serta analisa yang terpadu terhadap potensi gangguan keamanan di wilayah perbatasan khususnya wilayah Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Filipina. Dimana Filipina juga merupakan basis bagi beberapa gerakan teroris yang saling berafiliasi antara satu dengan lainnya. Di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terindikasi memiliki potensi gangguan ancaman Foreign Terrorist Fighter (FTF) dan Cross Border Lines yang cukup signifikan. Sehingga hal ini mampu mengancam keselamatan bangsa dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak Isnilon Hapilon diangkat menjadi pimpinan tertinggi Abu Sayyaf, ancaman ISIS semakin kuat di Asia Tenggara. Di tambah lagi Isnilon Hapilon diangkat sebagai Amir ISIS di Asia tenggara oleh pemimpin tertinggi ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi pada tahun 2016 di Filipina, yang mana mereka juga merencanakan salah satu provinsi di bawah kekuasaan Kekhalifan Negara Islam yang disebut dengan “Wilayat”. Wilayat yang akan didirikan di wilayah

Filipina bagian selatan ini akan di proyeksikan sebagai representasi kekhalifahan Islam di Asia Tenggara²². “Wilayat” tersebut akan dijadikan sebagai basis dan transit bagi militan Negara Islam Asia Tenggara yang dikenal juga dengan FTF sekembalinya dari Timur Tengah untuk melanjutkan perjuangan mendirikan Negara Islam di kawasan atau di negara mereka berasal. Rencana pendirian “wilayat” Negara Islam tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas militan ISIS asal Asia Tenggara dalam menjalankan propaganda jihad di Timur Tengah, yang sebelumnya juga telah mendeklarasikan berdirinya sayap lokal ISIS Asia Tenggara di Irak dan Suriah yang dikenal dengan “Katibah Nusantara”²³.

Serangan ancaman teror bom yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di klaim langsung oleh ISIS, seperti serangan bom yang terjadi di Jakarta pada awal 2014, kemudian ancaman aksi bunuh diri di Kuala Lumpur pada penghujung tahun 2015, maupun bom

²² United Nation, “Report Of The World Ministerial Conference On Organized Transnational Crime, Nepal”. dalam <https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/49/748>. diakses 29 Mei 2019

²³ J.C. Liow, “Escalating ISIS threat in Southeast Asia: Is the Philippines a weak line?” dalam <https://edition.cnn.com/2016/07/07/opinions/isissoutheast-asia-liow/>, diakses 20 September 2019

mobil yang meledak di Thailand pada pertengahan tahun 2017 dianggap sebagai andil dari kelompok-kelompok militan islam yang telah terindikasi berafiliasi ISIS. Serangan bom yang kian terjadi membuktikan bahwa kelompok-kelompok ini serius untuk membentuk negara Islam di negara asal mereka. Keberangkatan beberapa warga negara Indonesia dan juga Malaysia terbilang signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang di publish pada Seminar “Nasib WNI Simpatisan ISIS di Suriah dan Irak” yang diadakan oleh Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia dimana data tersebut menguraikan tentang jumlah warga Indonesia yang menjadi simpatisan ISIS, sebagai berikut:

Tabel 1. Data WNI terkait Foreign Terrorist Fighters ISIS

STATUS	SURIAH & IRAK		AFGANISTAN	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita
Masih di Iraq & Suriah	451	188	-	-
Mati di Iraq & Suriah	107	4	-	-
Returnees	76	21	-	-
Deportees	315	238	-	-
Planning to Iraq & Syria	116	62	-	-

Orang Dewasa	-	-	3	2
Planning to Afghanistan	-	-	1	1
Unidentified	-	-	-	-
TOTAL	1065	513	4	3

Sumber : BNPT-FTF Task Force (2019)

Dari data terlampir di atas, membuktikan bahwa propaganda dan upaya radikalisisasi yang dilakukan oleh kelompok mereka sangat berpengaruh dan mendapatkan simpati besar dari masyarakat. Kembalinya FTF membawa bekal pengalaman berperang dan strategi dalam melakukan penyerangan seperti yang mereka alami di Irak dan Suriah. Dukungan yang diberikan merupakan dukungan penuh untuk setiap kegiatan penyerangan yang dilakukan. Rohan Gunatra, kepala International Centre for Political Violence and Terrorism Research, menyatakan bahwa pada Jihadist yang kembali ke Asia Tenggara di bekali ratusan ribu dolar yang digunakan untuk membiayai semua persiapan rancangan penyerangan. Pesatnya perkembangan ISIS di Asia Tenggara tidak lepas dari dukungan kelompok-kelompok militan lokal di kawasan²⁴. Adapun berdasarkan data

²⁴ Channel News Asia, "Philippine militants behead 2 Vietnamese hostages: Army",

yang diperoleh peneliti, berikut daftar kelompok bersenjata yang rutin melakukan latihan militer di Mindanao:

- *Moro National Liberation Front* (MNLF) dibawah pimpinan Prof. Dr. Nur Misuari dengan daerah operasi di wilayah Sulu, Mindanao dan Zamboanga. Kelompok ini memiliki jumlah pengikut sekitar 17.700 orang.
- *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dibawah pimpinan Al-Hadj Murad Ibrahim dengan daerah operasi di wilayah Darapanan, Sultan Kudarat, dan Maguindanao. Kelompok ini memiliki jumlah pengikut sekitar 15.000 orang.
- *Bangsamoro Islamic Freedom Fighters* (BIFF) dibawah pimpinan Ismael Abu Bakar dengan daerah operasi di wilayah Basilan dan Maguindanao. Kelompok ini memiliki jumlah pengikut lebih dari 500 orang.
- *Communist Party of the Philippines/New People's Army* (CPP-NPA) dibawah pimpinan Jose Maria Sison dengan daerah operasi di Southern Mindanao dan Far South Mindanao. Kelompok ini memiliki jumlah pengikut sekitar 3.200 orang.
- *Abu Sayyaf Group* (ASG) dibawah pimpinan Radulan Sahiron, Isnilon Hapilon, dan Al-Habsy Misaya dengan daerah operasi di wilayah Sulu, Basilan, dan Tawi-Tawi. Kelompok ini memiliki jumlah pengikut lebih dari 600 orang.
- *Maute Group* dibawah pimpinan Omar Maute dan Abdullah Maute dengan daerah operasi di wilayah Lanao del Sur dan Lanao del Norte. Kelompok ini memiliki jumlah pengikut lebih dari 500 orang.
- *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) dibawah pimpinan Attaullah/ Abu Ammar Jununi dengan daerah operasi di wilayah Myanmar. Kelompok ini memiliki jumlah pengikut lebih dari 600 orang.
- *Royal Sulu Force* (RSF) dibawah pimpinan Prof. Dr. Nur Misuari dengan daerah operasi di wilayah Sulu. Kelompok ini memiliki jumlah pengikut lebih dari 400 orang.
- *Jamaah Anshorut Daulah Indonesia* (JAD) dibawah pimpinan Zainal Anshori dengan daerah operasi di wilayah Indonesia dimana kelompok ini menjadi dalang dalam beberapa teror bom di Indonesia. Kelompok ini

Dalam https://channelnewsasia.com/wiki/Terrorismo_sa_Pilipinas#cite_note-63., diakses 13 September 2019

memiliki jumlah pengikut lebih dari 200 orang.

- *The Muslim Brotherhood Al Ikhwatul Muslimah* dibawah pimpinan Mohammed Badie dengan daerah operasi di wilayah Asia Tenggara. Kelompok ini memiliki jumlah pengikut lebih dari 500 orang.

Dua diantara kelompok bersenjata tersebut telah menyatakan Allegiance/ komitmen mereka untuk berafiliasi dengan ISIS dengan mendirikan Islamic State di Filipina melalui penyebaran paham Radikalisme serta Aksi Terrorisme, yaitu Abu Sayyaf Group dan Maute Group.

Aksi terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menjadi perhatian serius dari pemerintah. Kelompok yang merupakan bagian dari kelompok Jamaah Ansharut Tauhid, yaitu sebuah kelompok pecahan dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang dipimpin oleh Abu Bakar Baasyir. Kelompok JAD dikabarkan memiliki afiliasi yang kuat dengan kelompok ISIS di Suriah dan Irak.

Kerawanan akan kondisi lalu lintas para pelintas batas yang undocumented citizen ini memberikan bukti bahwa

terdapat kelemahan dalam pengamanan dan pengecekan setiap lalu lintas masuk kedalam wilayah masing-masing negara. Menurut sensus Filipina , terdapat ribuan WNI di Filipina yang merupakan kelompok pendatang dari negara asing terbesar di Filipina. Beberapa WNI datang ke Mindanao pada awal 1970, menetap dan menikah dengan wanita lokal. Tetapi pada awal 1980 status WNI mulai menjadi ilegal, mereka diantaranya adalah nelayan dan pedagang kecil-kecilan.

Keberadaan masyarakat Indonesia asal Sangir dan Talaud di Mindanao, Filipina Selatan telah berlangsung lama sebelum Perang Dunia II sehingga diperkirakan saatini sudah generasi ketiga. Dari total jumlah masyarakat Indonesia yang berdarah Sangir dan Talaud, menurut tempat kelahiran didapatkan data bahwa +/- 897 orang lahir di Indonesia, sedangkan yang +/- 7.049 lahir di Filipina. Kegiatan lintas batas di wilayah *Border Crossing Area* (BCA) pada *Border Crossing Station* (BCS)-RI Tibanban ke Miangas maupun sebaliknya masih sangat kecil, namun disinyalir banyak penyeberangan yang dibantu oleh oknum tertentu tanpa menggunakan dokumen. Selama ini warga yang status kewarganegaraan

belum jelas itu bekerja sebagai buruh, tani, dan nelayan. Pemerintah Filipina tidak akan bertindak semena-mena melakukan deportasi, sebab ada kesepakatan warga yang status kewarganegaraan belum jelas diberikan kesempatan untuk menentukan sikap memilih menjadi warga negara Indonesia atau Filipina.

Apabila berdasarkan fakta lapangan dan sejarah yang telah terjadi, kondisi seperti sejumlah orang-orang Indonesia yang berdiam tanpa izin di daerah Filipina dan sejumlah orang Filipina yang berdiam tanpa izin di daerah Indonesia. Kemudian orang-orang Indonesia, penduduk daerah Indonesia di sebelah utara yang mondar-mondir mengunjungi Filipina tanpa izin dan begitu pula orang-orang Filipina, penduduk daerah Filipina di sebelah Selatan yang mondar-mandir mengunjungi daerah Indonesia tanpa izin. Mondar mandir-nya warga negara dari kedua belah pihak di daerah perbatasan itu telah berjalan sejak lama dan hal demikian itu telah menjadi adat kebiasaan mereka. Sehingga apabila kerawanan seperti ini dibiarkan, maka akan semakin memperbesar kemungkinan menyusupnya simpatisan ISIS ke Indonesia.

Wilayah Sulawesi Utara sangat berpotensi terhadap berkembangnya jaringan terorisme yang mengancam dari wilayah Filipina.²⁵ Untuk melihat pola ancaman terorisme yang berada di wilayah Sulawesi Utara yakni ancaman terorisme yang mengancam di wilayah Sulawesi Utara menjadi bagian dari kejahatan transnasional yang mengancam negara-negara di dunia. Apalagi hal ini semakin dipermudah dengan akses keluar masuk bagi pelintas batas, *undocumented citizen*, penyelundupan senjata yang marak terjadi, kemudian banyaknya wilayah pantai yang tidak berpenghuni yang memudahkan akses untuk masuk kedalam wilayah Indonesia. Sehingga berdasarkan teori Pohon Terorisme milik A.M. Hendropriyono bahwa wilayah Sulawesi Utara memiliki potensi besar pada kategori daun, akar dan ranting/cabang/batang yang memiliki potensi tumbuh subur akibat siklus, atmosfer, pupuk, dan tanah yang tumbuh subur. Karakteristik ancaman terorisme yang mengancam wilayah Sulawesi Utara

²⁵ Okezone News, "Mewaspada Potensi Ancaman Keamanan di Kawasan Asia Tenggara", dalam <https://nasional.okezone.com/read/2019/03/09/337/2027883/mewaspada-potensi-ancaman-keamanan-di-kawasan-asia-tenggara>, diakses 20 September 2019

ini sudah memenuhi kategori dari karakteristik kejahatan transnasional dimana sudah pasti organisasi yang mengancam bersifat kelompok dan memiliki jaringan hierarkis antara satu dan lainnya baik dari jaringan yang ada di Indonesia maupun di Filipina. Meskipun mereka tidak mengambil alih wilayah Sulawesi Utara, tapi wilayah Sulawesi Utara menjadi tempat yang nyaman untuk bersembunyi dan ditambah lagi banyak pulau-pulau yang tidak berpenghuni juga. Selain itu, ancaman FTF yang datang, *undocumented citizen*, dan penyelundupan senjata yang terjadi memberikan fakta bahwa memang ada pendanaan yang terstruktur bagi gerakan teroris yang mendukung pergerakan ini. Ditambah lagi antar jaringan teroris Indonesia dengan jaringan teroris yang ada di Filipina telah memiliki keterkaitan terkait afiliasi mereka dengan ISIS.

Strategi Pertahanan Negara dalam menghadapi Ancaman Terorisme di Perbatasan Indonesia-Filipina

Untuk menghadapi pola ancaman terorisme yang dijabarkan diatas maka diperlukan sebuah strategi yang tepat. Tujuan dari menghadapi ancaman terorisme di perbatasan Indonesia-

Filipina adalah guna meminimalisir ancaman terorisme yang masuk dari perbatasan melihat kondisi perbatasan di wilayah Miangas dan Marore kerap dilalui oleh pelintas batas dan ancaman FTF yang baru kembali dari Suriah dan Irak. Ditambah lagi dengan keberadaan *undocumented citizen* dan penyelundupan senjata ilegal yang kerap terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina ini.

Kemudian diperlukan penggunaan sumber daya yang digunakan Kementerian Pertahanan dalam menghadapi ancaman terorisme di perbatasan Indonesia-Filipina adalah kekuatan yang solid antara manusia dan software, penguasaan wilayah, penempatan personil, semangat, dedikasi dan loyalitas prajurit yang tinggi, dukungan masyarakat, dukungan anggaran yang cukup, serta koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

Untuk mencapai suatu tujuan, maka diperlukan cara/ taktik/ strategi agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan Undang-Undang maka untuk menghadapi besarnya kerawanan ancaman terorisme yang mengancam wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, maka perlu dirancang sebuah strategi dengan memaksimalkan sinergi kantor

wilayah pertahanan dengan instansi/lembaga yang terkait dalam pengawasan wilayah perbatasan dengan membuat legal standing yang jelas tentang kedudukan Kantor Wilayah Pertahanan Sulawesi Utara terhadap lembaga/instansi yang lain yang terkait dalam menghadapi ancaman terorisme di perbatasan Indonesia-Filipina. Kemudian membuat Skala Prioritas Patroli / pengawasan dengan menganalisa perkembangan lingkungan strategis dan potensi ancaman yang akan muncul. Kemudian memperhitungkan kondisi alam seperti kondisi cuaca, kondisi angin, kondisi pasang surut, gelombang besar dan tinggi, angin kencang.

Penggunaan teknologi satelit juga diperlukan untuk maksimalisasi patroli dan pengawasan wilayah perbatasan dan kontrol cuaca. Penguatan dan kesejahteraan anggota TNI yang bertugas di wilayah perbatasan. Kemudian penugasan Tim Perbatasan yang memiliki masa tugas berkepanjangan / tidak berganti-ganti guna penyelesaian masalah dengan tuntas. Perlunya pembentukan operasi Intelijen yang kuat. Melakukan pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan yang maksimal. Kemudian

melakukan operasi sosiologi yang kuat melalui lembaga pendidikan dan lembaga masyarakat non pemerintah.

Diperlukan juga optimalisasi sinergi Kementerian Pertahanan dengan Instansi/ Lembaga terkait. Kemudian mengubah mindset masyarakat di daerah perbatasan agar tidak terpengaruh radikalisme serta menjadikan masyarakat sebagai informan terkait indikasi radikalisme di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina khususnya wilayah Sulawesi Utara.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Wilayah Sulawesi Utara yang berada di perbatasan Indonesia-Filipina memiliki kerawanan dan ancaman terorisme yang tinggi apabila melihat keadaan para pelintas batas yang dengan mudah keluar masuk wilayah Indonesia, *undocumented citizen*, penyelundupan senjata yang marak terjadi, dan banyaknya wilayah pantai yang tidak berpenghuni yang memudahkan akses untuk masuk kedalam wilayah Indonesia.

Peneliti merekomendasikan agar Kementerian Pertahanan memaksimalkan fungsi kantor wilayah pertahanan dengan kejelasan legal standing sebagai leading sector dalam wilayah pertahanan

masing-masing daerah agar terciptanya kerjasama dalam berkomunikasi antar lembaga-lembaga yang menjalankan kebijakan dari Kementerian Pertahanan. Kemudian diadakan sosialisasi keberadaan Kantor Wilayah Pertahanan kepada para stakeholder terkait guna membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dalam menghadapi ancaman bidang pertahanan. Kantor wilayah pertahanan bekerjasama dengan institusi pendidikan guna melakukan kaderisasi pendidikan bela negara pada generasi muda dengan mengerahkan TNI setempat selaku pihak yang memiliki pengetahuan lebih tentang kondisi setempat khususnya wilayah perbatasan. Selain itu, Universitas Pertahanan perlu membuat sebuah program studi yang memang dikhususkan untuk concern di bidang pengamanan seluruh wilayah perbatasan Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Milles, Matthew B., Huberman, J. Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publication Inc.

Jurnal

Bangun, Budi Hermawan. (2017). "Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional". *Jurnal Hukum Tanjungpura*. Volume 1. Issue 1. h.52-63

Rezky, Ade Nurul. (2018). "Kerjasama Trilateral Indonesia Malaysia Filipina Dalam Menangulangi Kelompok Teroris Abu Sayyaf". *Jurnal Hubungan Internasional*. Volume 6, Nomor 3

Suardi. (2017). "Penegakan Hukum di Laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia". *Jurnal Hukum Pembangunan*. Volume 15. Nomor 1. h. 1-16.

Winawarti, Indien. 2017. "Penguatan Hak Berdaulat (Sovereign Right) pada ZEE Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut". *Jurnal Legality*. Volume 24. Nomor 2. 172-180

Website

Aldi. (2019). "10 Fakta Penangkapan Terduga Teroris di Bitung: Kronologi, Rencana Teror hingga Transit ke Poso". Dalam [https://manado.tribunnews.com/2019/05/08/10-fakta-pena ngkapan-terduga-teroris-di-bitung-kronologi-rencana-teror-hingga-transit-ke-poso](https://manado.tribunnews.com/2019/05/08/10-fakta-pena-ngkapan-terduga-teroris-di-bitung-kronologi-rencana-teror-hingga-transit-ke-poso)., diakses 21 September 2019

_____. (2019). "Abu Bakar Ba'asyir akan pilih bertahan di penjara, dan tolak bebas bersyarat". Dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46942952>., Diakses 18 September 2019

Burgiono, T.J.A. (2014). "PH, Indonesia sign model maritime pact". Dalam <https://globalnation.inquirer.net/105035/ph-indonesia-sign-model-maritime-pact>., diakses 05 Agustus 2019

Channel News Asia. (2017). "Philippine militants behead 2 Vietnamese hostages: Army". Dalam https://channelnewsasia.com/wiki/Terrorismo_sa_Pilipinas#cite_note-63., diakses 13 September 2019

- CNN Indonesia. (2019). "Kemenlu Sebut Tak Ada Nelayan Indonesia Diculik Abu Sayyaf". Dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190619164319-106-404686/kemenlu-sebut-tak-ada-nelayan-indonesia-diculik-abu-sayyaf>., diakses 17 Juli 2019
- Departement of Foreign Affairs of Philippine Government. (2014). Document: *Agreement between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Republic Indonesia concerning the delimitation of the Exclusive Economic Zone boundary*. Dalam <http://www.officialgazette.gov.ph/2014/05/23/agreement-between-the-government-of-the-republic-of-the-philippines-and-the-government-of-the-republic-indonesia-concerning-the-delimitation-of-the-exclusive-economic-zone-boundary>/diakses 05 Agustus 2019.
- Filipina, Senat. (2017). "Treaties/Agreement Submitted For Concurrence By The Senate". Dalam https://www.senate.gov.ph/17th_congress/treaties_17thcongress.asp., diakses 10 September 2019
- Ikanubun. (2017). "Misteri Hilangnya 4 Prajurit TNI AL di Perbatasan RI-Filipina". Dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/3020485/misteri-hilangnya-4-prajurit-tni-al-di-perbatasan-ri-filipina>., diakses 05 Agustus 2019.
- Liow, J.C. (2016). "Escalating ISIS threat in Southeast Asia: Is the Philippines a weak line?". Dalam <https://edition.cnn.com/2016/07/07/opinions/isissoutheast-asia-liow/>., diakses 20 September 2019
- Nation, United. (1999). "Report Of The World Ministerial Conference On Organized Transnational Crime, Nepal". Dalam <https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/49/748>. Diakses 29 Mei 2019
- News, Okezone. (2019). "Mewaspadai Potensi Ancaman Keamanan di Kawasan Asia Tenggara". Dalam <https://nasional.okezone.com/read/2019/03/09/337/2027883/mewaspadai-potensi-ancaman-keamanan-di-kawasan-asia-tenggara>., Diakses 20 September 2019
- Putra, Yudha Manggala. (2013). "Penjaga Pantai Filipina Amankan 86 Korban Perdagangan Manusia". Dalam <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/01/13/mgkmlq-penjaga-pantai-filipina-amankan-86-korban-perdagangan-manusia>., diakses 05 Agustus 2019
- Rogin, J. (2016). "Islamic State Is Rapidly Expanding in Southeast Asia,' Bloomberg View." Dalam <http://originwww.bloombergview.com/articles/2015-0529/Islamic-state-makes-a-move-on-southeast-asia>., Diakses 20 September 2019.
- Sartono, Alfian. (2014). "Polda Papua Dalami Penyelundupan Senjata dari Filipina Selatan". Dalam <https://regional.kompas.com/read/2014/05/23/0843297/Polda.Papua.Dalami.Penyelundupan.Senjata.dari.Filipina.Selatan>., diakses 05 Agustus 2019
- SM. (2017). "Wah !!! Jalur Peredaran Senjata Api Ilegal Ditemukan Kodam XIII/Merdeka di Sulut, Ini Buktinya", Dalam <https://beritamanado.com/wah-jalur-peredaran-senjata-api-ilegal-ditemukan-kodam-xiiimerdeka-di-sulut-ini-buktinya/>., Diakses 05 Agustus 2019.

Suhendi, Adi. (2012). “*Sulawesi Utara Daerah Rawan Masuknya Senjata Api Ilegal.*” Dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2012/01/16/sulawesi-utara-daerah-rawan-masuk-nya-senjata-api-ilegal>., diakses 05 Agustus 2019

Sukoyo, Yermia. (2017). “*3 Wilayah Perbatasan Indonesia Rawan disusupi ISIS.*” Dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/462672/3-wilayah-perbatasan-indonesia-rawan-disusupi-isis>., Diakses 18 Juli 2019